

Article

Perempuan di Eksekutif: Representasi Tri Rismaharini Sebagai Walikota Surabaya Periode 2010-2020

Jasmine Maryam Btarindra Ubaedi¹, Salma Huroidhoh^{2*}, Siti Atika Optafiyacha³, Aniqotul Ummah⁴

¹²³⁴ Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta

*Correspondensi Penulis: huroidhohsalma@gmail.com

Abstract: *Women's representation in the political process can provide a different perspective and provide positive changes that are inclusive and comprehensive for society. Through inclusive approaches and innovative programs, Tri Rismaharini plays an important role in women's empowerment and handling social issues related to women directly. The purpose of this research was to find out Tri Rismaharini's role in realizing women's representation in Surabaya. This research uses qualitative research methodology through a literature study with several sources, including online journals, books, and publications related to women's representation. This research employs Joni Lovenduski's theory of women's representation, which takes into account both descriptive and substantive representation. The first finding, through Tri Rismaharini's policy programs, namely Economic Heroes, Gang Dolly localization, and Women's Care City, can improve women's welfare. Second, Tri Rismaharini, who served as Mayor of Surabaya, has played an important role in changing the local political landscape through the presence and empowerment of women in Surabaya in producing inclusive policies. We conduct this research as a novelty, expanding the discourse on the study of women's representation in Indonesia.*

Keywords: *Women's Representation, Women's Political Representation, Tri Rismaharini*

Abstrak: Representasi perempuan pada proses politik dapat memberi perspektif yang berbeda dan memberikan perubahan positif yang inklusif dan menyeluruh terhadap masyarakat, melalui pendekatan inklusif dan program inovatif, Tri Rismaharini memainkan peran penting pada pemberdayaan perempuan dan penanganan isu sosial terkait perempuan secara langsung. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Tri Rismaharini dalam mewujudkan representasi perempuan di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan beberapa sumber, termasuk jurnal *online*, buku dan publikasi terkait dengan keterwakilan dan representasi perempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep representasi perempuan menurut Joni Lovenduski dengan mempertimbangkan representasi deskriptif dan representasi substantif. Temuan pertama, melalui program kebijakan Tri Rismaharini yaitu Pahlawan ekonomi, lokalisasi Gang Dolly dan Kota Peduli Perempuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan. Kedua, Tri Rismaharini yang menjabat sebagai Walikota Surabaya, memiliki peran penting dalam mengubah lanskap politik lokal melalui kehadiran dan pemberdayaan perempuan di Surabaya dalam menghasilkan kebijakan yang inklusif. Penelitian ini dilakukan sebagai kebaruan serta memperluas diskursus mengenai kajian representasi perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: Representasi Perempuan, Keterwakilan Politik Perempuan, Tri Rismaharini

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl.
Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Isu-isu perempuan telah menarik banyak perhatian, terutama dalam konteks demokrasi dan politik. Keterwakilan perempuan dalam politik inklusif sangat penting untuk mencapai masyarakat yang demokratis yang secara akurat mewakili kebutuhan, keprihatinan, dan ambisi seluruh penduduknya. Keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik diharapkan dapat berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih komprehensif yang mengakui dan menangani berbagai sudut pandang yang ada di masyarakat (Nwankwor, 2022). Untuk mencapai demokrasi yang inklusif, penting untuk memastikan bahwa setiap segmen masyarakat, termasuk perempuan, terwakili secara memadai. Perempuan merupakan bagian yang signifikan dari populasi, dan tidak tepat untuk mendiskusikan demokrasi jika segmen masyarakat yang cukup besar ini kurang terwakili (Tim Peneliti Kelompok Kerja Riset M.H. Thamrin & Associates, 2019).

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh World Economic Forum: The Global Gender Gap Report tahun 2016-2023. Evaluasi indeks kesenjangan gender dari WEF mengevaluasi empat faktor utama: partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan pemberdayaan politik (World Economic Forum, 2023).

Tabel 1.
The Global Gender Gap Report

Tahun	Peringkat
2016	88
2017	84
2018	85
2020	85
2021	101
2022	92
2023	87

Sumber: World Economic Forum, 2016-2023

Peringkat Indonesia dalam Laporan Kesenjangan Gender Global secara konsisten mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2017, namun mengalami penurunan peringkat ke-101 pada tahun 2021. Peringkat Indonesia terus meningkat sejak tahun 2022 dan terus meningkat hingga tahun 2023. Menurut data, Indonesia mencapai posisi tertinggi dalam peringkat dari tahun 2018 hingga 2020, yaitu peringkat ke-85. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki kesenjangan gender, terutama di bidang politik.

Inklusi perempuan dalam pengarusutamaan gender sangat penting karena mengharuskan para pembuat kebijakan, lembaga eksekutif dan legislatif untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang perspektif dan sensitivitas gender. Pemahaman ini diperlukan untuk mengembangkan instrumen yang memprioritaskan kepentingan perempuan (Fauziah, Rizki, & Ramdan, 2023). Oleh karena itu, penting untuk melibatkan partisipasi perempuan dalam perumusan setiap kebijakan. Tingkat keterwakilan perempuan di bidang politik dapat dilihat dari kehadiran mereka di lembaga eksekutif. Salah satu contoh kehadiran perempuan dalam jabatan eksekutif ditunjukkan oleh Jacinda Ardern, seorang politisi Selandia Baru yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2017-2023. Menutup kesenjangan upah gender adalah salah satu kebijakan yang berupaya memberdayakan perempuan. Selain itu, terdapat undang-undang yang bermaksud untuk memperpanjang cuti melahirkan berbayar dan mengalokasikan dana untuk pengasuhan anak dengan

membangun fasilitas penitipan anak untuk lebih menyeimbangkan peran gender dan mendukung perempuan yang bekerja (Krisnawati, 2020). Dalam banyak hal, kesetaraan gender telah mengalami kemajuan pesat berkat dukungan Jacinda Ardern terhadap perempuan dalam politik. Ardern telah menunjukkan bahwa perempuan dapat memainkan peran yang dinamis dan penting dalam pemerintahan dengan menggunakan strategi kepemimpinan yang empatik dan proaktif. Inklusi perempuan dalam proses perencanaan kebijakan sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan efisien (Reddy, Capello, & Torres, 2018).

Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan terwakili secara memadai dalam posisi eksekutif di Pemerintah Daerah, seperti Gubernur dan Walikota/Bupati. Hal ini penting untuk menumbuhkan budaya pembuatan kebijakan publik yang memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan perempuan di tingkat daerah. Namun demikian, rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan menjadi pengingat akan terbatasnya keterlibatan perempuan di bidang politik. Hal ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang berlaku dan dinamika kekuasaan yang terus membentuk kehidupan individu di Indonesia (Fauziah, Rizki, & Ramdan, 2023). Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik dapat disebabkan oleh asumsi-asumsi kultural, struktural, dan bias gender. Kesenjangan elektabilitas antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018.

Tabel 2.
Jumlah Keterpilihan Perempuan di Pilkada

Pilkada	Paslon		Paslon		Total
	Gubernur/Bupati/Walikota Laki-Laki	Perempuan	WaGub/WaBup/WaWako Laki-Laki	Perempuan	
2015	240	23	242	21	526
2017	86	10	91	5	192
2018	153	16	154	15	338

Sumber: Open Data KPU, 2015-2018

Berdasarkan data Pilkada 2018, jumlah perempuan yang terpilih sebagai kepala dan wakil kepala daerah masih sangat rendah, yaitu hanya 31 orang dari 338 orang atau hanya 9,17% (Perludem, 2018). Angka ini menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada pertumbuhan jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada Pilkada 2015, persentasenya hanya 8,7%, dan pada Pilkada 2017, persentasenya turun lebih jauh lagi menjadi 5,90% (Prihatini, 2017). Data ini menyoroti kesenjangan keterpilihan perempuan dalam pilkada serentak yang dilaksanakan dalam tiga tahap pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Rekapitulasi hasil dari tiga gelombang pilkada tersebut hanya menghasilkan 90 kepala dan wakil kepala daerah perempuan secara keseluruhan.

Tri Rismaharini atau dikenal dengan Risma memenangkan pemilihan Pilkada 2010 dan menjadi Wali Kota Surabaya dengan perolehan 932.291 suara. Ia terpilih kembali pada Pilkada 2015 dengan total 893.087 suara. Tri Rismaharini merupakan Walikota perempuan pertama di Surabaya yang dikenal luas karena pendekatan kepemimpinannya yang progresif, inovatif, dan sangat berpusat pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Retnowati WD Tuti & Sa'diyah El Adawiyah (2020) yang menyoroti gaya kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai pengusaha birokrasi, yang terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari Tri Rismaharini. Ia dikenal karena kesederhanaannya, kejujurannya, dan pendekatannya yang penuh kasih dan merakyat. Tri Rismaharini, walikota Surabaya, secara konsisten berpihak pada masyarakat Surabaya, tanpa memandang status atau kelas mereka. Selain itu, dalam penelitian Assegaf (2021) menyoroti perubahan positif yang telah terjadi di Surabaya di bawah kepemimpinannya. Perubahan tersebut antara lain peningkatan pelayanan publik, pengembangan ruang terbuka hijau, upaya pembaharuan kota, dan penerapan kebijakan inklusif yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Beberapa peneliti fokus pada gaya kepemimpinan Tri Rismaharini selama menjabat jadi Walikota Surabaya. Belum ditemukan adanya pembahasan terkait peran Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya selama dua periode (2010-2020) dalam mewujudkan representasi perempuan di Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini menarik diteliti untuk melihat representasi perempuan di

Surabaya. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang apa saja yang sudah dilakukan oleh Tri Rismaharini dalam mewujudkan representasi perempuan di Surabaya. Sehingga penelitian ini penting dilakukan sebagai kebaruan (novelty) serta memperluas diskursus mengenai kajian representasi perempuan dalam politik di Indonesia dengan rumusan masalah yaitu bagaimana peran Tri Rismaharini selama menjabat sebagai Walikota Surabaya dalam mewujudkan representasi perempuan di Surabaya?. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena perempuan dalam politik memiliki dampak yang signifikan dalam merumuskan kebijakan pembangunan pro-perempuan yang sangat efektif dalam mengatasi tantangan masyarakat yang mendasar, termasuk kesehatan perempuan dan anak-anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan perempuan, dan isu kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, terdapat juga dampak yang signifikan dalam domain-domain penting seperti pembangunan perdamaian, perumusan kebijakan sosial, dan kemajuan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Representasi Perempuan

Representasi politik perempuan menurut Joni Lovenduski dalam bukunya yang berjudul *State Feminism and Political Representation* bahwa perempuan harus mempunyai kekuatan politik yang dibutuhkan melalui penyatuan permasalahan pada perempuan pada perdebatan politik, sehingga terdapat pendekatan yang menganggap bentuk dari perdebatan politik merupakan tahapan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang diperlukan oleh perempuan. Sehingga, menurut Joni Lovenduski representasi dari politik perempuan memiliki dua aspek yang utama yaitu representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif berfokus pada inklusi dari perempuan sebagai aktor politik, dimana perempuan secara numerik pada lembaga politik sebagai refleksi dari komposisi gender pada populasi dan representasi substantif yang berhubungan dengan pertimbangan pada kepentingan perempuan pada proses pengambilan keputusan politik. Sehingga, Joni Lovenduski memberi penjelasan bahwa tidak hanya berfokus pada jumlah perempuan yang mendapat jabatan politik yang masuk ke dalam representasi deskriptif, namun juga menekankan melalui kepentingan perempuan yang ikut terlibat pada pengambilan keputusan yang masuk ke dalam representatif substantif yang kemudian representasi substantif dan deskriptif sebagai bentuk konsep dari keterwakilan perempuan di lembaga politik dan sebagai jaminan bahwa suara mereka ditampung dan didengar sehingga dapat mendorong pemberdayaan dan kesetaraan perempuan (Lovenduski, 2005).

Representasi mempunyai empat bentuk yaitu deskriptif, substantif, simbolik dan formal. Representasi formal berfokus pada pada prosedur hukum mengenai bagaimana calon dipilih, representasi deskriptif secara komposisi proporsional berfokus antara yang diwakili dan mewakili, representasi deskriptif yang menjadi rujukan pada komposisi yang ada di lembaga legislatif maupun eksekutif sebab dapat mengetahui latar belakang melalui status sosial, gender dan etnis, representatif substantif dimana yang menjadi wakil harus dapat mengusahakan kepentingan orang-orang yang diwakili, selanjutnya representatif simbolis dimana bentuk dari kekuatan representasi ini bukan dari sisi apa ataupun siapa yang menjadi simbol, namun seberapa kuat simbol tersebut dilihat (Pitkin, 1967). Pada keempat representasi yang digagas oleh Pitkin representasi tersebut dibentuk berdasarkan gagasan aktivitas (Soesono, 2013).

Politisi Perempuan

Politik kehadiran menurut Anne Phillips dalam bukunya yang berjudul *"The Politics of Presence"* mengatakan bahwa politisi perempuan mempunyai kelengkapan dalam mewakili kepentingan kelompoknya melalui hubungannya dengan representasi deskriptif dan representasi substantif, sehingga jika representasi deskriptif dimana jumlah perempuan pada tingkat parlemen mengalami peningkatan, maka kepentingan perempuan akan semakin dipentingkan di tingkat parlemen. Pernyataan tersebut didasari dari perbedaan perempuan dan laki-laki melalui kejahatan seksual yang dialami perempuan, pendidikan dan pekerjaan, namun Phillips tidak dapat menekankan apakah jumlah yang cukup banyak di parlemen dapat memberi perubahan pada agenda politik dalam mementingkan kepentingan perempuan melalui penggunaan istilah *"shot in the dark"* (Phillips, 1995). Mereka yang cukup aktif dalam berpolitik yang kemudian membuat keputusan dari masyarakat yang

tidak mau berpolitik dengan detail, padahal keputusan tersebut berkaitan dengan kehidupan banyak orang termasuk beberapa permasalahan perempuan pada lembaga eksekutif melalui proses politik (Daulay, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui studi literatur. Penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang secara khusus untuk menyelidiki fenomena sosial dengan meneliti perspektif dan pengalaman partisipan (Sugiyono, 2005). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mengacu pada database online, jurnal, buku, publikasi ilmiah dan informasi lainnya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur sebagai sumber data sekunder. Studi literatur dilakukan melalui beberapa sumber, termasuk jurnal *online*, buku, dan publikasi terkait dengan keterwakilan perempuan di politik perempuan, dan representasi Tri Rismaharini. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami konteks suatu keadaan, sehingga menghasilkan gambaran yang rinci mengenai potret situasi dalam setting alamiahnya, menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang ada di kawasan tersebut (Fadli, 2021). Peneliti berpartisipasi dalam konteks dan lingkungan fenomena yang diteliti, dalam hal ini representasi Tri Rismaharini sebagai walikota surabaya periode 2010-2015.

Sejumlah riset yang melibatkan teknik pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian secara bersama-sama disebut sebagai penelitian kepustakaan, atau terkadang studi pustaka (Zed, 2004). Data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan studi literatur akan dianalisis menggunakan reduksi data yaitu menyaring data yang tidak perlu dan kemudian diolah, selanjutnya penyajian data dengan mengorganisir penyajian data informasi, kemudian menarik kesimpulan yaitu menggabungkan data yang ada dengan teori. Selanjutnya, data yang diperoleh disajikan menggunakan teknik analisis data, dalam mendapatkan hasil yang sesuai penulis menganalisis dengan cara yang kritis. Analisis data dengan kritis merupakan bentuk yang menjelaskan bahwa peneliti bukan menjadi bentuk subjek yang memiliki kebebasan nilai saat pengerjaan penelitian, namun dari pandangan tertentu dari penulis dan menjadi bentuk dari upaya penulis dalam mempermudah pendekatan pemahaman melalui analisa kebenaran dari berbagai pendapat para ahli yang selanjutnya dapat diperoleh makna dari berbagai pendapat tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini memberi wawasan yang signifikan mengenai Tri Rismaharini selama menjabat walikota surabaya dalam mewujudkan representasi perempuan di surabaya. Hasil penelitian ini digunakan dalam pengembangan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan representasi perempuan dalam politik masa kini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Walikota Surabaya

Tri Rismaharini adalah seorang walikota yang menarik perhatian baik secara nasional maupun internasional. Ia memegang rekor sebagai walikota perempuan pertama di Surabaya. Tri Rismaharini telah menjabat selama dua periode berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2020 (Huri et al., 2022). Kebijakan-kebijakan tersebut terdapat dalam beberapa sektor, dalam sektor ekonomi Pemerintah Kota Surabaya telah meluncurkan program inovatif yang disebut Pahlawan Ekonomi pada tahun 2010. Program ini didesain untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut dengan memberdayakan ibu rumah tangga dari keluarga miskin. Melalui program ini, peserta diberi kesempatan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan mendapatkan pelatihan dan pendampingan usaha. Tahapan program ini dimulai dari bimbingan mental, pembuatan produk, hingga pendampingan dalam pemasaran produk. Hal ini adalah salah satu dari banyak program yang diperkenalkan dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini, yang dikenal sebagai program Tri Rismaharini. Melalui program-program seperti Program Pahlawan Ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti UMKM dan perempuan rumah tangga, serta memperkuat ekonomi lokal. Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha, program-program Tri Rismaharini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan sosial-ekonomi di Surabaya (Putri & Prabawati, 2022).

Program Pahlawan Ekonomi, yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2010, adalah sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis komunitas. Program ini bermula dari kesadaran akan masih adanya keluarga yang tergolong miskin meskipun salah satu anggota keluarga sudah bekerja, sehingga berusaha untuk memberdayakan peran kedua anggota keluarga, khususnya istri atau ibu, dalam perekonomian rumah tangga di Surabaya. Program Pahlawan Ekonomi mencakup kegiatan di sektor Usaha Kuliner, Industri Rumah Tangga, dan Industri Kreatif. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan di berbagai bidang seperti konseling mental, pembuatan produk yang berkualitas, pengemasan yang menarik, kepatuhan bisnis, dan peningkatan peluang pemasaran dan promosi (Monalisa, Indartuti, & Novaria, 2016).

Kebijakan lain yang dilakukan selama masa jabatan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya adalah proses pelokalisasi kawasan Dolly. Kawasan Gang Dolly di Surabaya, yang terletak di wilayah Dukuh Kupang, terkenal sebagai pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Selain sebagai pusat prostitusi, Gang Dolly juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi beberapa pedagang kaki lima, tukang parkir, dan perantara prostitusi. Hal ini membentuk interaksi simbiosis yang saling menguntungkan di antara keduanya. Berdasarkan wawancara dengan seorang pekerja seks komersial (PSK), tarif untuk layanan kencannya bervariasi mulai dari 100.000 hingga 150.000 untuk setiap sesi singkat yang berlangsung selama 1-2 jam. Dalam satu malam, ia dapat menampung sekitar 5 hingga 10 klien. Pendapatan yang ia dapatkan kemudian dibagi-bagikan kepada germo dan calo yang memfasilitasi kedatangan para pengunjung (Wahyuni, 2014).

Penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya tidak hanya menjadi upaya untuk menciptakan suasana kota yang lebih aman dan beradab, tetapi juga merupakan langkah yang diambil dengan memperhatikan tantangan internal dan eksternal yang mungkin terjadi. Pemerintah Kota Surabaya, di bawah kepemimpinan Ibu Tri Rismaharini, menghadapi proses penutupan ini dengan mengacu pada dasar hukum yang kuat, termasuk undang-undang tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, pemberantasan perdagangan orang, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak. Selain itu, peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan larangan penggunaan bangunan untuk kegiatan asusila juga menjadi dasar dalam penanganan masalah lokalisasi Dolly. Dengan mengikuti kerangka hukum yang ada, pemerintah kota bertujuan untuk merespons secara efektif dan bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial yang berkaitan dengan lokalisasi tersebut, sambil memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Berbagai pandangan dan perspektif, baik yang mendukung maupun yang menentang, sering kali diperbincangkan dan diabadikan oleh berbagai media massa. Dalam konteks ini, Walikota Tri Rismaharini kerap mendapat kritik atas keputusannya dalam menutup lokasi bisnis prostitusi di Surabaya, yang disambut dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung langkah tersebut dengan alasan perlindungan terhadap anak-anak dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Namun, di sisi lain, terdapat golongan yang menentang penutupan tersebut, termasuk wanita pekerja seks, mucikari, calo, dan masyarakat yang tergantung pada lokalisasi tersebut untuk mencari nafkah. Polemik ini menunjukkan kompleksitas dalam menangani masalah sosial dan kebijakan publik di tingkat lokal (Roosinda & Noviar Renindia Rachman, 2021).

Penutupan lokalisasi Gang Dolly di Surabaya, Jawa Timur, telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitarnya, terutama di Kelurahan Putat Jaya yang bergantung pada keberadaan lokalisasi tersebut. Dampaknya tidak hanya terbatas pada masalah sosial, tetapi juga meluas ke sektor ekonomi. Banyaknya pedagang kaki lima dan PKL yang sebelumnya beroperasi di area Gang Dolly kini mengalami penurunan pendapatan karena sepi dari pengunjung. Meskipun beberapa orang yang terdampak telah diperkerjakan di dinas-dinas pemerintah kota, banyak juga yang masih mengalami kesulitan mencari pekerjaan baru. Selain itu, terjadi peralihan fungsi lahan yang dulunya dijadikan tempat prostitusi menjadi tempat usaha baru seperti pembuatan sepatu, usaha sablon, dan bimbingan belajar. Meskipun ada upaya untuk mengalihkan fungsi lahan tersebut, tetap saja ada ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tidak adil karena hanya sebagian kecil yang mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintah kota. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menangani dampak sosial dan ekonomi dari penutupan lokalisasi Gang Dolly (Natsir,

2019).

Program pemberdayaan perempuan, ekonomi dan sosial pasca penutupan lokalisasi Gang Dolly adalah salah satu inisiatif yang dimiliki oleh Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya. Melalui program ini, Tri Rismaharini dan pemerintahannya berupaya memberikan solusi bagi perempuan dan warga terdampak, baik secara ekonomi maupun sosial, dengan memberikan pelatihan keterampilan, rekrutmen tenaga kerja, serta penjangkaran dukungan dari pihak swasta dan LSM. Program pemberdayaan perempuan Tri Rismaharini berfokus pada pemenuhan kebutuhan pekerja seks komersial melalui pendekatan sosial dan menawarkan alternatif yang layak untuk memfasilitasi transisi mereka ke pekerjaan yang berbeda. Tri Rismaharini berkolaborasi dengan beberapa dinas dan instansi. Salah satunya adalah program pelatihan yang dilakukan dalam kemitraan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya. Program ini menyediakan berbagai peluang pelatihan, seperti permesinan, seni kuliner, dan menjahit, dengan tujuan mendapatkan keterampilan tambahan yang dapat diterapkan untuk mendapatkan pekerjaan di industri lain. Selain itu, program ini juga memberikan alokasi dana untuk akuisisi dan pemulihan aset-aset lokalisasi (Tim DetikJatim, 2022). Program rehabilitasi dilaksanakan, yang mencakup dukungan psikologis dan promosi integrasi sosial dalam kaitannya dengan prospek pekerjaan baru. Tujuannya adalah agar para mantan pekerja seks memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan terhormat melalui pelatihan dan pendampingan.

Selain itu kebijakan lain yang diterapkan Tri Rismaharini ketika menjabat sebagai Walikota Surabaya yaitu di mana Pemerintah kota Surabaya telah meluncurkan program "Kota Peduli Perempuan" yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender di seluruh tingkatan, mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan. Program ini menyediakan pos-pos di berbagai lokasi di kota Surabaya di mana kaum perempuan dapat melaporkan atau memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka. Selain itu, dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program perlindungan yang mencakup mulai dari ibu hamil, persalinan, hingga bayi yang berusia tiga bulan, sehingga memberikan perlindungan yang komprehensif bagi seluruh anggota masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak (Riski, 2012).

Representasi Walikota Surabaya Tri Rismaharini Menurut Joni Lovenduski

Menurut Lovenduski, kehadiran setidaknya satu perempuan dalam proses kebijakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memasukkan aspirasi dan perspektif perempuan ke dalam kebijakan tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan positif yang lebih merata dan inklusif. Joni Lovenduski mendukung tuntutan partisipasi perempuan dengan beberapa argumen yang kuat. Pertama, argumen keadilan menekankan bahwa monopoli perwakilan oleh kaum laki-laki tidak adil, terutama di negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara demokratis modern. Hal ini karena perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat. Kedua, argumen pragmatis menyatakan bahwa melalui partisipasi perempuan, politik akan menjadi lebih konstruktif dan ramah, karena perempuan cenderung membawa pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, argumen perbedaan menggarisbawahi bahwa perempuan akan membawa gaya dan pendekatan yang unik dalam politik, yang berpotensi untuk memperbaiki dinamika politik secara keseluruhan dan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, representasi perempuan sebagai aktor politik akan membawa manfaat yang signifikan bagi keberagaman, kesetaraan, dan kesejahteraan dalam masyarakat (Budiatri, 2011).

Lovenduski mengemukakan bahwa dua aspek mendasari feminisasi politik. Pertama, peran perempuan dan laki-laki dalam politik dipengaruhi oleh lembaga-lembaga politik yang ada. Kedua, cara pandang perempuan terhadap perwakilan politik sama pentingnya dengan proses-proses politik yang berjalan. Menurut Lovenduski, representasi perempuan dalam sistem politik menguji klaim demokrasi suatu negara. Partisipasi perempuan dalam politik mencerminkan klaim mereka terhadap kewarganegaraan dan keterlibatan dalam urusan politik. Oleh karena itu, representasi politik merupakan fokus utama bagi kaum feminis, meskipun seringkali tidak diakui secara luas. Representasi politik dipahami sebagai kehadiran anggota suatu kelompok dalam lembaga-lembaga politik formal. Sebagai seorang aktor politik dalam teori Joni Lovenduski, Tri Rismaharini, yang menjabat sebagai Walikota Surabaya, memiliki peran yang mencolok dalam mengubah lanskap politik lokal.

Dalam jabatannya, Tri Rismaharini telah menjadi arsitek utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Surabaya. Melalui program-program inovatifnya, seperti "Kota Peduli Perempuan", Tri Rismaharini telah mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan kota, memastikan kesetaraan gender, dan menangani isu-isu yang memengaruhi perempuan secara langsung. Pendekatannya yang inklusif telah melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa aspirasi semua warga, termasuk perempuan, didengar dan diperhatikan. Selain itu, Tri Rismaharini juga aktif dalam menangani isu-isu sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, termasuk ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Langkah-langkah konkretnya untuk menciptakan lingkungan yang ramah gender dan meningkatkan kesejahteraan semua warga telah menjadikan Tri Rismaharini sebagai contoh nyata bagaimana perempuan dapat memainkan peran yang signifikan dalam politik lokal untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan kesetaraan.

Selama masa jabatan Tri Rismaharini, representasi substantif mengacu pada pengakuan dan integrasi kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Ini melibatkan memastikan bahwa perspektif, kebutuhan, dan aspirasi perempuan diwakili secara adil dan diintegrasikan dalam kebijakan dan program pemerintah. Tri Rismaharini menekankan pentingnya inklusi dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kebijakan, mulai dari kesehatan hingga ekonomi, serta dalam penanganan isu-isu sosial yang berkaitan dengan perempuan. Selama kepemimpinannya, Tri Rismaharini berupaya untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga memperkuat partisipasi mereka dalam pembangunan kota. Representasi substantif ini memungkinkan adanya kebijakan yang lebih sensitif gender dan berdampak positif pada pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Tri Rismaharini, selama menjabat sebagai Walikota Surabaya periode 2010-2020, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Perannya telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan representasi perempuan di Surabaya. Melalui kebijakan inklusif, program-program inovatif seperti "Kota Peduli Perempuan", penutupan Gang Dolly, program perlindungan kesehatan, dan pendekatannya yang progresif dalam memastikan kesetaraan gender, Tri Rismaharini telah berhasil memperjuangkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan kota. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan penanganan isu-isu sosial yang mempengaruhi perempuan secara langsung, Tri Rismaharini telah menciptakan lingkungan yang lebih ramah gender dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Surabaya. Keterwakilan perempuan bukan hanya sekadar tentang jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, tetapi juga mengenai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik yang substansial. Menurut Joni Lovenduski, konsep representasi perempuan dalam politik mencakup aspek deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif berkaitan dengan inklusi perempuan sebagai aktor politik secara numerik, sementara representasi substantif menyoroti pertimbangan terhadap kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan, sehingga dapat mendorong pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, peran perempuan dalam politik memiliki dampak yang signifikan dalam merumuskan kebijakan pembangunan pro-perempuan yang efektif dalam mengatasi tantangan masyarakat yang mendasar, seperti kesehatan perempuan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan isu kekerasan terhadap perempuan. Keterwakilan perempuan dalam berbagai domain penting seperti pembangunan perdamaian, perumusan kebijakan sosial, dan kemajuan ekonomi juga memberikan kontribusi yang berarti dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk mencapai

kesetaraan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan dan suara perempuan diakui dan diwakili secara substansial dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan banyak orang.

Saran

Saran penelitian yang dapat diusulkan untuk pemerintah guna meningkatkan representasi perempuan dalam ranah politik. Pertama, pemerintah dapat melakukan studi komprehensif untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai posisi politik yang signifikan. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya politik, stereotip gender, dan tindakan diskriminatif. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik, pemerintah dapat mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi perempuan yang ingin terlibat dalam kehidupan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiatri, A. P. (2011). Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi Undang-Undang yang Responsif Gender. *Kajian*, 16(3), 465-492.
- Daulay, H. (2007). *Perempuan dalam Kelut Gender*. Medan: USU Press.
- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdan, R. (2023). Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49, 21-22.
- KPU. (2017, November 9). *Dataset - Data Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 - Open Data Komisi Pemilihan Umum*. Retrieved April 3, 2024, from Open Data KPU: <https://opendata.kpu.go.id/dataset/844b3249d-e9ff5ada3-374b5c542-869c8>
- KPU. (2021, November 23). *Dataset - Data Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 - Open Data Komisi Pemilihan Umum*. Retrieved April 3, 2024, from Open Data KPU: <https://opendata.kpu.go.id/dataset/c2406a01b-377610c1d-1161cf306-6e2d9>
- KPU. (2021, November 23). *Dataset - Data Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 - Open Data Komisi Pemilihan Umum*. Retrieved April 3, 2024, from Open Data KPU: <https://opendata.kpu.go.id/dataset/0276bb839-2cacada2c-ae16c0def-ebbf9>
- Krisnawati, E. (2020, November 19). *Jacinda Ardern: Kebijakan dan Prestasinya Sebagai Perdana Menteri*. Retrieved April 3, 2024, from Tirto.id: <https://tirto.id/jacinda-ardern-kebijakan-dan-prestasinya-sebagai-perdana-menteri-f6cl>
- Leopold, T. A., Ratcheva, V., & Zahidi, S. (2015). *The Global Gender Gap Report 2016*. World Economic Forum.
- Lovenduski, J. (2005). *State Feminism and Political Representation*. Cambridge University Press.
- Maulana, A. C. (2021). Kepemimpinan Tri Rismaharini Sebagai Wali Kota Surabaya Sampai Menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia. *ResearchGate*.
- Nwankwor, C. (2022, February 23). *Priorities for advancing women's equal political leadership in the coming year | Brookings*. Retrieved April 3, 2024, from Brookings Institution: <https://www.brookings.edu/articles/priorities-for-advancing-womens-equal-political-leadership-in-the-coming-year/>
- Perludem. (2018, August 1). *Potret Perempuan Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2018*. Retrieved April 3, 2024, from Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi: <https://perludem.org/2018/08/01/potret-perempuan-kepala-daerah-terpilih-di-pilkada-2018/>
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press.
- Pitkin, H. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.

- Prihatini, E. S. (2017, Agustus 8). *Elektabilitas perempuan di pilkada 2018 meningkat*. Retrieved April 3, 2024, from theconversation.com: <https://theconversation.com/elektabilitas-perempuan-di-pilkada-2018-meningkat-101179>
- Reddy, S., Capello, A., & Torres, J. (Eds.). (2018). *The Women's Political Participation and Leadership Issue*. UN WOMEN.
- Schwab, K. (2019). *The Global Gender Gap Report 2020*. World Economic Forum.
- Schwab, K., Leopold, T. A., Ratcheva, V., & Zahidi, S. (2017). *The Global Gender Gap Report 2017*. World Economic Forum.
- Soesono, N. (2013). *Representasi Politik*. Jakarta: Puskapol UI.
- Tim DetikJatim. (2022, June 18). *Riwayat Penutupan Dolly, Sindiran untuk Risma hingga Bebas Prostitusi*. Retrieved April 4, 2024, from Detik.com: <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6133606/riwayat-penutupan-dolly-sindiran-untuk-risma-hingga-bebas-prostitusi>
- Tim Peneliti Kelompok Kerja Riset M.H. Thamrin & Associates. (2019). Laporan Penelitian Keterwakilan Perempuan Sumatera Selatan. *Journal KPU RI*, 1-78.
- Tuti, R. W., & Adawiyah, S. E. (2020). Kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini Sebagai Model Birokrasi Efektif. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 4, 73-82.
- World Economic Forum. (2018). *The Global Gender Gap Report 2018*. World Economic Forum.
- World Economic Forum. (2021). *Global Gender Gap Report 2021: Insight Report*. World Economic Forum.
- World Economic Forum. (2023). *The Global Risks Report 2023*. World Economic Forum.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.